

Kesejahteraan Sosial : Sebuah Idealisme

Kesejahteraan sosial adalah kondisi ideal yang dicita-citakan setiap manusia. Baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat dan juga negara sebagai kolektivitas terbesar kehidupan manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam kesejahteraan sosial merupakan nilai-nilai yang universal. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dari keyakinan dan kepercayaan yang kuat yang mengilhami peradaban manusia.

Kesejahteraan sosial yang dapat diartikan sebagai "metainstitution" merupakan salah satu hal yang selalu menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Dasawarsa 60-an di Indonesia, kesejahteraan sosial (kesejahteraan rakyat) menjadi isu sentral, sampai sekarang dan juga pada masa-masa yang akan datang.

Persoalan-persoalan yang sering diangkat masih berkisar pada pemerataan pendapatan dan berkisar pada persoalan-persoalan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Sementara yang menyangkut persoalan-persoalan kesejahteraan sosial dari sudut pandang ideologis masih kurang.

Buku yang aslinya berjudul "*Ideology and Social Welfare*" ini justru lebih banyak mengkaji persoalan-persoalan kesejahteraan dari aspek ideologis. Empat golongan pemikiran, yaitu golongan Antikolektivis, golongan kolektivis Setengah Hati, golongan Sosialis Fabian dan golongan Marxis lebih banyak mewarnai pembahasan buku ini. Sebelum pembahasan tentang pemikiran dari empat golongan tersebut, pada bab I lebih banyak dibicarakan konsep-konsep tentang masyarakat, negara, masalah sosial dan kebijakan sosial. Sedangkan pada bab VI (bab terakhir) lebih banyak membicarakan konsep-konsep

dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keadilan sosial dan kebijakan sosial.

Buku karangan *Vic George dan Paul Wilding* yang disunting oleh *Budi Murdono dan Bhanu Setyanto* ini kalau boleh dibilang lebih bersifat komparatif. Nilai-nilai sosial, konsep masyarakat dan negara, peranan pemerintah dan konsep tentang negara kesejahteraan atau "*welfare state*" dari masing-masing golongan diungkap secara gamblang berdasarkan pemikiran tokoh dari masing-masing golongan. Hayek, Friedman dan Powell adalah tokoh-tokoh dari kubu Antikolektivis. Keynes, Beveridge dan Galbraith lebih banyak mewarnai pemikiran dari golongan Kolektivis Setengah Hati. Dari golongan Sosialis Fabian dipelopori oleh Tawney, Titmuss dan Crossland. Sementara dari golongan Marxis dipelopori oleh Laski, Strackey dan Miliband. Teori-teori tentang masyarakat, negara, masalah sosial dan kebijakan sosial selalu memiliki keterkaitan. Pembahasan teori-teori tersebut sangat dipengaruhi oleh teori-teori Sosiologi dan konsep-konsep T. Parsons banyak memberikan warna.

Menarik untuk dipelajari adalah konsep tentang "*welfare state*". Sekalipun masyarakat barat telah menolak sosialisme sebagai sistem atas dasar kesadaran ". . . dibandingkan dengan kapitalisme modern, sosialisme itu kurang efisien, mempercepat pelapisan sosial dan menuju kedespotisme jenis baru" demikian menurut Hayek (hal. 54). Perkembangan negara kesejahteraan ditandai oleh adanya konsensus politik yang luas tentang masalah-masalah ideologis. Atau "*the end of ideology*" (berakhirnya ideologi) menurut istilahnya Bell.



Vic George dan Paul Wilding, Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat, Grafiti, 1992

Masih berkisar negara kesejahteraan, Beveridge dan Galbrath lebih mengutamakan kesejahteraan individu. Dasar pemikirannya adalah kapitalisme Amerika tidak mengabdikan pada kesejahteraan individu atau kepentingan umum. Tujuan Galbrath adalah terbentuknya suatu negara yang menaruh perhatian pada kesejahteraan, kepentingan umum dan kehidupan yang lebih baik - - - negara kesejahteraan. (hal. 96). Kedua tokoh tersebut lebih condong pada pendekatan pragmatis tentang peranan negara dalam masyarakat kesejahteraan.

Sementara itu golongan Sosialis Fabian percaya, bahwa melalui pentahapan dan perembesan, negara kapitalis dapat dibujuk untuk memperbaiki diri. Welfare state merupakan hasil pendekatan ini. "Crossland mendeskripsikan tradisi negara kesejahteraan sebagai persoalan yang mungkin paling terasa dalam kebijakan Partai buruh" (hal. 126). Selanjutnya disebutkan bahwa tujuan tradisional "kesejahteraan sosial adalah mengurangi penderitaan yang diakibatkan karena kemiskinan, kerawanan dan kemelaratan sosial.

Lain halnya golongan Marxis yang tidak mendukung pandangan Machiavelli tentang negara kesejahteraan, yakni bahwa kelas yang berkuasa telah bersedia dan memberi kelonggaran-kelonggaran kecil untuk mencegah tuntutan-tuntutan keras di masa yang akan datang.

Menurut golongan Marxis, negara kesejahteraan dapat dilihat dengan baik hanya dalam konteks perjuangan kelas. "Perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial, bukanlah hasil keinginan yang rasional dan obyektif akan kemaslahatan bersama seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali, melainkan harga yang dibayar demi prinsip-prinsip hukum yang menjamin dominasi kekayaan . . ." ungkap Laski (hal. 168). Kesejahteraan sosial yang dibicarakan dalam buku ini masih didominasi oleh dua ideologi besar, Kapitalis dan Sosialis. Kelompok kapitalis lebih mengutamakan individu dalam kekuasaannya di bidang ekonomi dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi didemokratisasi. "Masyarakat melalui konsumen telah berkuasa, masyarakat melalui

pemerintah tidak perlu dan tidak boleh melakukan campur tangan". (hal. 76)

Golongan pertama dan kedua, Antikolektivis dan Golongan Kolektivis setengah hati memiliki beberapa kesamaan nilai. Kedua golongan ini lebih memfokuskan pada kepercayaan akan kebebasan, individualisme dan perusahaan-perusahaan swasta yang kompetitif.

Akan tetapi golongan setengah hati tidak begitu mempertahankan nilai-nilai yang mutlak dan cenderung bersyarat serta dibatasi oleh pragmatisme intelektual mereka. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang terbaik masih menjadi keyakinan yang kuat bagi golongan Setengah Hati. Mereka juga percaya bahwa kapitalisme memerlukan pengaturan dan pengendalian hukum.

Lain halnya dengan golongan Marxis yang memiliki tiga nilai pokok sosialisme, yaitu kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Kebebasan dalam hal ini mencakup konsep yang amat luas. Menurut Laski "Kebebasan adalah suatu hal yang positif. Kebebasan bukan hanya berarti tidak adanya kekurangan". (hal. 145). Ada tiga aspek penting yang menjadi perhatian dari kebebasan: pribadi, politik dan ekonomi. Laski meng-"counter" kapitalis dengan menyatakan bahwa sebenarnya tidak akan ada kebebasan bagi massa rakyat dalam masyarakat kapitalis. Dalam masyarakat kapitalis, kemerdekaan dibiarkan tetapi tidak pernah dipenuhi.

Pada bab akhir buku ini, lebih banyak membahas penafsiran-penafsiran penyunting. Kegagalan yang dialami oleh negara kesejahteraan setelah perang dunia II dan sebab-sebabnya merupakan bagian awal bahasan dari penyunting. Sebab-sebab kegagalan yang dialami lebih menitikberatkan pada faktor kelemahan administratif. Sebagaimana kondisi di negara berkembang sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ada pada dasarnya cukup baik, tetapi kalau sudah sampai tahap pelaksanaan banyak sekali ditemui kekurangan-kekurangan. Kalau boleh dibilang, bab terakhir (keadilan sosial dan kebijakan sosial) lebih bersifat "flash back" terhadap kegagalan-kegagalan yang dialami oleh negara kesejahteraan Pasca perang Dunia II. Kegagalan yang

dialami lebih bersifat hakiki kapitalisme sebagai seperangkat nilai dan sistem ekonomi, dalam arti etika kesejahteraan dan etika kapitalisme pada dasarnya bertentangan. Jika kebijakan sosial menginginkan tujuan-tujuannya tercapai, maka dibutuhkan etika baru "keadilan sosial.

Dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah literatur-literatur yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Sebab selama ini literatur tentang masalah itu masih sulit didapatkan dan walaupun ada lebih banyak berbahasa Inggris. Tidaklah berlebihan

jika buku ini dapat dijadikan buku pegangan wajib bagi pemerhati masalah kesejahteraan sosial. Penulisnya sendiri, Vic George adalah Guru Besar Ilmu Administrasi dan Pekerjaan Sosial di University of Kent disamping sebagai pekerja sosial di London. Sedangkan Paul Wilding, termasuk pengajar senior Ilmu Administrasi Sosial di College University, Cardiff Inggris. Buku ini merupakan salah satu bukti bahwa konsep-konsep tentang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial banyak dilahirkan di negara yang terkenal dengan "*The Elizabeth Poor Law of 1601*" Inggris.